

Hakikat Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta: Kajian Filsafat Pendidikan Barat dan Islam

Miswanto

Universitas Kiai Abdullah Faqih Gersik, Indonesia

70abdurrazzaq@gmail.com

ABSTRAK

Islamic Higher Education (PTI), both state and private, plays a strategic role in developing intellectually, spiritually, and morally superior Muslim human resources. However, the differences in institutional status between State Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIN) and Private Islamic Religious Higher Education Institutions (PTKIS) often give rise to differences in philosophical orientations, paradigms, and educational practices. This study aims to analyze the nature of state and private Islamic higher education from the perspective of Western and Islamic educational philosophies, identify common ground and philosophical differences between the two, and formulate philosophical implications for the development of an integrative and value-oriented paradigm for Islamic higher education. This study uses a qualitative approach with library research on relevant classical and contemporary literature. Data were analyzed using content analysis techniques and a comparative-philosophical approach. The results show that Islamic higher education exists in a dialogue between modern rationality developed in Western educational philosophy and the transcendental values that are at the core of Islamic educational philosophy. The differences between PTKIN and PTKIS are more implementative and managerial in nature, rather than in their underlying philosophical objectives. This research emphasizes the importance of developing an integrative paradigm of Islamic higher education to maintain academic relevance while strengthening the epistemological and axiological identity of Islamic education amidst global challenges.

Keywor: Islamic Higher Education; Philosophy of Education; *PTKIN* and *PTKIS*; Integration of Science.

Informasi Artikel

Naskah Diterima:
25 April 2026

Naskah Direvisi
25 Mei 2026

Naskah Diterbitkan:
25 Juni 2026

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi Islam (PTI), baik yang berstatus negeri maupun swasta, memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia Muslim yang unggul secara intelektual, matang secara spiritual, dan berkarakter moral (Zakki & Syafi'i, 2023). Di Indonesia, Pendidikan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) seperti STAIN, IAIN, dan UIN berkembang dalam kerangka regulasi negara dengan mandat utama integrasi keilmuan keislaman dan ilmu umum (Husain & Wahyuni, 2023). Sementara itu, Pendidikan Tinggi Islam Swasta (PTKIS) tumbuh dari inisiatif masyarakat dengan karakteristik ideologis, manajerial, dan pedagogis yang lebih beragam (Aliyah, Anif, Warisno, Andari, & Anshori, 2023). Perbedaan latar kelembagaan tersebut berimplikasi pada perbedaan orientasi, paradigma, dan praktik pendidikan yang dijalankan. Meskipun demikian, baik PTKIN maupun PTKIS pada hakikatnya memiliki tujuan fundamental yang sama, yakni mewujudkan pendidikan Islam yang bermakna, berdaya saing, dan responsif terhadap dinamika zaman (Aziz, 2024).

Dalam kajian akademik, pendidikan tinggi sering dianalisis melalui perspektif filsafat pendidikan Barat, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Perspektif tersebut menekankan aspek rasionalitas, pengalaman empiris, kebebasan individu, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan sosial (Singh, 2024). Di sisi lain, filsafat pendidikan Islam menawarkan paradigma yang berakar pada nilai tauhid, integrasi ilmu dan amal, keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi, serta tujuan pembentukan insan kamil (Singh, 2024). Kedua perspektif ini tidak jarang diposisikan secara dikotomis, meskipun pada titik tertentu memiliki irisan

nilai yang dapat didialogkan dalam konteks pendidikan tinggi Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pendidikan tinggi Islam dari berbagai sudut pandang, seperti kebijakan pendidikan (Afzali, 2023), pengembangan kurikulum (Ahmadi, Syukur, Shodiq, & Rahman, 2022), manajemen kelembagaan (Yudiawan & Himmah, 2023), serta wacana integrasi keilmuan (Ubaidila & Mustamir, 2023). Selain itu, terdapat pula kajian yang membahas perbandingan filsafat pendidikan Barat dan Islam dalam konteks pendidikan secara umum (Khan, Jan, & Chughtai, 2023). Namun demikian, kajian yang secara khusus dan komprehensif menelaah hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta dalam perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam masih relatif terbatas. Literatur yang ada cenderung membahas PTKIN dan PTKIS secara terpisah atau menempatkannya dalam kerangka normatif-administratif, sehingga belum menyentuh dimensi filosofis yang lebih mendasar.

Padahal, perbedaan status kelembagaan antara PTKIN dan PTKIS tidak hanya bersifat struktural dan organisatoris, melainkan juga filosofis. Perbedaan tersebut tercermin dalam tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat ilmu, relasi antara pendidik dan peserta didik, serta orientasi lulusan yang ingin dihasilkan. Di sinilah terdapat gap penelitian, yaitu minimnya kajian filosofis yang bersifat integratif dan dialogis yang mampu menjelaskan hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta dengan menggunakan kerangka filsafat pendidikan Barat dan Islam secara simultan.

Urgensi penelitian ini semakin menguat di tengah tantangan globalisasi, komersialisasi pendidikan, serta disrupsi nilai yang dihadapi pendidikan tinggi Islam dewasa ini. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai landasan filosofisnya,

pendidikan tinggi Islam berpotensi terjebak pada orientasi pragmatis dan instrumental, sehingga kehilangan identitas epistemologis dan aksiologisnya. Oleh karena itu, kajian filosofis menjadi penting sebagai basis reflektif dan kritis untuk menata kembali arah pendidikan tinggi Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai keislaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta dalam perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam; (2) mengidentifikasi titik temu serta perbedaan filosofis antara kedua perspektif dalam konteks PTKIN dan PTKIS; dan (3) merumuskan implikasi filosofis bagi pengembangan paradigma pendidikan tinggi Islam yang integratif, humanis, dan berorientasi nilai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian filsafat pendidikan Islam serta menjadi rujukan konseptual bagi pengelola dan pemangku kebijakan pendidikan tinggi Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian Pendidikan Tinggi Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah filsafat pendidikan Islam melalui analisis dialogis antara perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam dalam memahami hakikat Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang integratif dan komprehensif. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengelola dan pemangku kebijakan pendidikan tinggi Islam dalam merumuskan arah pengembangan kelembagaan, kurikulum, dan praktik pedagogik yang

berorientasi pada nilai, humanisme, dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperkuat landasan filosofis serta meneguhkan identitas epistemologis dan aksiologis pendidikan tinggi Islam di tengah dinamika dan tantangan global.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini disusun untuk membangun landasan teoretis dalam memahami hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta melalui dialog filsafat pendidikan Barat dan Islam. Penelusuran literatur difokuskan pada gagasan-gagasan filosofis yang membentuk orientasi, tujuan, dan praktik pendidikan tinggi, dengan menempatkan filsafat pendidikan Barat sebagai pijakan awal untuk membaca paradigma pendidikan tinggi modern yang secara historis dan konseptual turut memengaruhi perkembangan pendidikan tinggi Islam. Oleh karena itu, pembahasan kajian pustaka diawali dengan telaah mengenai hakikat pendidikan tinggi dalam perspektif filsafat pendidikan Barat.

1. Hakikat Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Barat

Dalam tradisi filsafat pendidikan Barat, pendidikan tinggi dipahami sebagai institusi strategis untuk mengembangkan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan kapasitas intelektual manusia. Akar konseptual pendidikan tinggi Barat dapat ditelusuri sejak pemikiran klasik Plato dan Aristoteles, yang memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia berakal dan berkeutamaan (*virtue*). Pada perkembangan selanjutnya, pemikiran modern seperti John Dewey menekankan pendidikan tinggi sebagai ruang demokratis untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial (Dewey, 1930). Dalam perspektif ini,

universitas tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga membentuk warga negara yang reflektif dan bertanggung jawab.

Filsafat pendidikan humanisme dan liberalisme menjadi landasan utama pendidikan tinggi Barat, dengan menempatkan manusia sebagai subjek otonom yang memiliki kebebasan akademik. Konsep *academic freedom* dan *autonomy of university* menjadi prinsip fundamental yang menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus bebas dari intervensi ideologis maupun politis (Altbach, 2011). Hakikat pendidikan tinggi dalam perspektif ini diukur melalui capaian akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, serta kontribusinya terhadap kemajuan peradaban manusia.

Namun demikian, sejumlah kritik juga diarahkan pada pendidikan tinggi Barat yang cenderung terjebak dalam orientasi pragmatis dan utilitarian. Pendidikan tinggi sering direduksi menjadi instrumen pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi semata, sehingga mengabaikan dimensi moral dan spiritual peserta didik (Giroux, 2014). Kritik ini menjadi penting sebagai pijakan dialog dengan filsafat pendidikan Islam, terutama dalam merumuskan hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta agar tidak kehilangan orientasi nilai.

2. Hakikat Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam

Berbeda dengan filsafat pendidikan Barat yang menekankan otonomi rasional manusia, filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan tinggi sebagai proses integral antara pengembangan intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk *insān kāmil*, yaitu manusia paripurna yang seimbang antara akal, hati, dan amal (al-Attas, 1993). Oleh karena itu, hakikat

pendidikan tinggi Islam tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai tauhid dan akhlak.

Konsep ilmu dalam filsafat pendidikan Islam bersifat hierarkis dan bernilai, di mana ilmu tidak bebas nilai (*value-free*), melainkan terikat pada tujuan pengabdian kepada Allah SWT (Nasr, 1989). Pendidikan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta, idealnya menjadi ruang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga mampu melahirkan sarjana Muslim yang berilmu, beretika, dan bertanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, perguruan tinggi Islam berfungsi sebagai pusat ta'dīb, bukan sekadar ta'lim.

Pemikir Muslim kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya reformulasi pendidikan tinggi Islam agar tetap relevan dengan tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas keislamannya. Fazlur Rahman (2024) menegaskan bahwa pendidikan tinggi Islam harus mampu melakukan sintesis kreatif antara warisan intelektual Islam dan ilmu pengetahuan modern. Dengan demikian, hakikat pendidikan tinggi Islam terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan (*al-aṣālah wa al-mu'āṣarah*).

3. Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta dalam Dialog Filsafat Barat dan Islam

Pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta di Indonesia berada dalam persimpangan antara tuntutan globalisasi pendidikan dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Secara kelembagaan, perguruan tinggi Islam negeri (PTKIN) memiliki mandat negara dalam pengembangan keilmuan dan moderasi beragama,

sementara perguruan tinggi Islam swasta (PTKIS) sering kali memiliki fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan dan penguatan identitas keislaman. Namun, keduanya menghadapi tantangan yang sama, yaitu kecenderungan pragmatisme pendidikan tinggi yang berorientasi pada akreditasi, daya saing lulusan, dan efisiensi manajerial.

Dialog antara filsafat pendidikan Barat dan Islam menjadi kerangka teoritis penting untuk memahami hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta secara lebih komprehensif. Dari filsafat Barat, pendidikan tinggi Islam dapat mengadopsi prinsip rasionalitas ilmiah, kebebasan akademik, dan budaya riset. Sementara dari filsafat pendidikan Islam, pendidikan tinggi memperoleh fondasi etis, spiritual, dan tujuan transendental yang memberi arah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Integrasi kedua perspektif ini bukanlah bentuk sinkretisme, melainkan seleksi kritis yang kontekstual.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lemahnya landasan filosofis sering menyebabkan pendidikan tinggi Islam kehilangan arah dan identitas (Azra, 2019). Oleh karena itu, kajian tentang hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta perlu diletakkan dalam kerangka filosofis yang dialogis dan integratif. Kerangka ini menjadi dasar konseptual untuk merumuskan paradigma pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh secara nilai dan berdaya jawab terhadap tantangan zaman.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) (Zed, 2008). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan

konseptual dan filosofis terhadap hakikat pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta dalam perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari literatur tertulis yang relevan, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan, observasi empiris, maupun wawancara, sehingga analisis difokuskan pada konstruksi pemikiran, argumentasi teoretis, dan kerangka filosofis yang berkembang dalam khazanah akademik.

Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang filsafat pendidikan Barat, seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme, serta karya-karya utama filsafat pendidikan Islam yang membahas konsep tauhid, integrasi ilmu, dan tujuan pembentukan insan kamil. Literatur sekunder meliputi artikel jurnal terakreditasi yang berkaitan dengan pendidikan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema dan kontribusinya terhadap penguatan kerangka analisis filosofis.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan prosedur sistematis, dimulai dari penelusuran literatur melalui basis data jurnal nasional dan internasional, kemudian dilanjutkan dengan seleksi sumber yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan filosofis-komparatif. Analisis diarahkan pada pengelompokan tema-tema konseptual yang muncul dalam literatur, kemudian dilakukan perbandingan dan dialog kritis antara perspektif filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam. Melalui proses ini, diidentifikasi titik

temu, perbedaan, serta kemungkinan integrasi nilai yang relevan dalam konteks pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta. Analisis dilakukan secara induktif, reflektif, dan argumentatif dengan menjaga koherensi logis serta konsistensi konseptual.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan silang antar-sumber dengan latar belakang pemikiran yang beragam guna meminimalkan bias subjektif peneliti. Konsistensi konsep dan argumentasi diuji dengan membandingkan pandangan para tokoh dan literatur dari periode serta aliran pemikiran yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas teoretis yang kuat dan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hakikat pendidikan tinggi Islam dalam perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Barat dan Islam

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa hakikat pendidikan tinggi Islam, baik yang berstatus negeri maupun swasta, secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis yang melandasi tujuan, orientasi, dan praktik pendidikannya. Analisis terhadap literatur filsafat pendidikan Barat dan Islam memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi diposisikan sebagai instrumen strategis dalam proses pembentukan manusia, meskipun dengan penekanan nilai dan orientasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, kedua perspektif tersebut hadir dan berinteraksi secara simultan dalam kerangka kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam perspektif filsafat pendidikan Barat, pendidikan tinggi dipahami sebagai sarana pengembangan rasionalitas, kapasitas intelektual, dan kemandirian berpikir individu. Aliran idealisme menekankan aktualisasi nilai-nilai universal melalui pengembangan akal, sementara realisme memandang pendidikan sebagai proses penguasaan realitas objektif melalui ilmu pengetahuan empiris. Pragmatisme memosisikan pendidikan tinggi sebagai wahana pemecahan masalah dan peningkatan kebermanfaatan praktis ilmu pengetahuan bagi kehidupan sosial, sedangkan eksistensialisme menegaskan peran pendidikan dalam membantu individu menemukan makna diri serta tanggung jawab personalnya. Kerangka pemikiran ini membentuk paradigma pendidikan tinggi modern yang menekankan kompetensi, efisiensi, dan relevansi sosial.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Islam, baik yang berstatus negeri maupun swasta, tidak terlepas dari pengaruh paradigma filsafat pendidikan Barat tersebut. PTKIN, sebagai institusi yang berada dalam sistem pendidikan nasional, cenderung mengadopsi pendekatan ilmiah modern, sistem kurikulum berbasis capaian pembelajaran, serta orientasi profesionalisme lulusan. Sementara itu, PTKIS, meskipun memiliki keragaman corak kelembagaan dan ideologis, juga mengintegrasikan prinsip-prinsip rasionalitas ilmiah dan relevansi praktis ilmu pengetahuan sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan daya saing institusi.

Di sisi lain, kajian terhadap filsafat pendidikan Islam menunjukkan bahwa pendidikan tinggi diposisikan dalam kerangka tauhid dengan tujuan pembentukan insan kamil. Pendidikan dipahami sebagai proses integratif antara ilmu, iman, dan amal, dengan orientasi yang tidak hanya

menekankan keberhasilan akademik dan profesional, tetapi juga pembentukan kesadaran moral dan tanggung jawab spiritual. Literatur filsafat pendidikan Islam menegaskan bahwa hakikat pendidikan tidak semata-mata bersifat instrumental, melainkan transformatif, yaitu membentuk manusia yang seimbang antara dimensi intelektual, spiritual, dan sosial.

Hasil kajian selanjutnya menunjukkan bahwa perbedaan antara PTKIN dan PTKIS lebih tampak pada aspek pengelolaan dan implementasi pendidikan, bukan pada tujuan filosofis dasarnya. PTKIN cenderung menampilkan wajah pendidikan tinggi Islam yang lebih terstandar, formal, dan birokratis, sedangkan PTKIS menunjukkan fleksibilitas ideologis serta kedekatan yang lebih kuat dengan tradisi keilmuan Islam tertentu. Meskipun demikian, kedua jenis perguruan tinggi tersebut berangkat dari tujuan yang sama, yaitu pengembangan manusia Muslim yang berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat pendidikan tinggi Islam baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) perlu dipahami dalam kerangka dialog filosofis antara filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam. Pendidikan tinggi Islam tidak berada pada posisi antagonistik terhadap paradigma Barat, tetapi juga tidak dapat menerimanya secara utuh tanpa kritik epistemologis dan aksiologis. Posisi ini menempatkan pendidikan tinggi Islam sebagai ruang dialektika antara rasionalitas modern dan nilai-nilai transendental Islam.

Dalam perspektif filsafat pendidikan Barat, pendidikan tinggi diposisikan sebagai instrumen pembebasan intelektual (*intellectual liberation*) dan penguatan

kapasitas manusia untuk memahami serta mengelola realitas sosial yang dinamis. Paradigma ini menekankan pengembangan rasionalitas, otonomi berpikir, metode ilmiah, serta profesionalisme lulusan. Kontribusi paradigma Barat tersebut tampak signifikan dalam penguatan sistem akademik pendidikan tinggi Islam, terutama dalam aspek metodologi penelitian, sistem penjaminan mutu, dan orientasi kompetensi lulusan. Namun, sebagaimana dikritik dalam berbagai kajian filsafat pendidikan, dominasi paradigma Barat yang bercorak sekuler dan positivistik berpotensi mereduksi makna pendidikan menjadi sekadar proses produksi sumber daya manusia yang terampil secara teknis, tetapi miskin orientasi nilai dan tujuan transendental.

Kondisi tersebut sejalan dengan kritik al-Faruqi (1989) yang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern tidak sepenuhnya bebas nilai (*value-free*), melainkan sarat dengan worldview Barat yang sekuler. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak cukup hanya mengadopsi struktur dan metode pendidikan Barat, tetapi perlu melakukan rekonstruksi epistemologis melalui integrasi nilai tauhid dalam seluruh aktivitas keilmuan. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan Islam hadir sebagai kerangka korektif sekaligus pengaya terhadap paradigma pendidikan Barat.

Filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan bukan hanya sebagai proses transmisi ilmu dan pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya (*insān kāmil*). Pendidikan tinggi Islam diarahkan pada integrasi antara penguasaan ilmu (*‘ilm*), pembentukan karakter (*akhlaq*), dan kesadaran transendental (*tauhid*). Ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam tidak dipandang sebagai entitas netral dan

otonom, melainkan sebagai amanah yang harus diarahkan untuk kemaslahatan umat dan pengabdian kepada Allah Swt.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip Islam dengan teori pendidikan modern merupakan prasyarat bagi terwujudnya pendidikan Islam yang holistik. Pendidikan Islam yang hanya menekankan aspek kognitif dan profesional tanpa dimensi spiritual berpotensi kehilangan orientasi nilai dan tujuan utamanya (Hadi, Anim, & Yasin, 2024). Lebih lanjut, penelitian Nur Afif dkk (2024) menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara filsafat pendidikan Barat dan Islam terletak pada orientasi akhir pendidikan. Pendidikan Barat menekankan efektivitas proses dan capaian pembelajaran, sedangkan pendidikan Islam menempatkan pendidikan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral-spiritual. Integrasi nilai Islam dalam sistem pembelajaran, termasuk di perguruan tinggi, menjadi strategi penting untuk menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas

Dalam konteks PTKIN dan PTKIS, perbedaan keduanya dapat dipahami sebagai variasi implementatif dari paradigma filosofis tersebut, bukan sebagai perbedaan substantif dalam hakikat pendidikan tinggi Islam. PTKIN, dengan dukungan negara dan regulasi akademik yang relatif kuat, cenderung lebih mudah mengadopsi standar akademik modern dan pendekatan ilmiah Barat. Namun, tantangan utama yang dihadapi PTKIN adalah menjaga agar proses modernisasi tersebut tidak menggerus identitas nilai dan tujuan transendental pendidikan Islam. Sebaliknya, PTKIS memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mempertahankan identitas keislaman yang kuat, tetapi sering menghadapi tantangan

dalam aspek kualitas akademik, tata kelola institusi, dan daya saing global.

Penelitian Armizi (2025) menegaskan urgensi Islamisasi pendidikan tinggi sebagai upaya mengatasi dominasi filsafat pendidikan Barat yang sekuler. Islamisasi dalam konteks ini bukan berarti menolak sains modern, tetapi mengintegrasikannya dalam kerangka nilai dan tujuan Islam, sehingga pendidikan tinggi Islam tidak kehilangan dimensi etis dan spiritualnya. Selain itu, suatu kajian menekankan pentingnya integrasi epistemologi Barat dan Islam sebagai fondasi pendidikan Islam moderat. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan tinggi Islam menghasilkan lulusan yang rasional, terbuka, dan kompeten, sekaligus memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial yang kuat (Rahmi, Pradipta, Rizqoh, & Huftron, 2025).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa hakikat pendidikan tinggi Islam baik negeri maupun swasta tidak ditentukan oleh status kelembagaannya, melainkan oleh orientasi filosofis yang mendasari penyelenggaraan pendidikannya. Pendidikan tinggi Islam idealnya dikembangkan melalui paradigma integratif yang memadukan rasionalitas ilmiah, kebebasan akademik, dan tanggung jawab moral-spiritual. Paradigma ini memungkinkan pendidikan tinggi Islam tetap relevan dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan jati diri keislamannya.

Titik Temu dan Perbedaan Filosofis Filsafat Pendidikan Barat dan Islam dalam Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam memiliki sejumlah titik temu konseptual yang relevan dengan pengembangan pendidikan tinggi Islam, baik di lingkungan PTKIN maupun

PTKIS. Salah satu titik temu utama terletak pada pandangan bahwa pendidikan tinggi merupakan sarana strategis untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Baik filsafat pendidikan Barat maupun Islam sama-sama menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembentukan kapasitas intelektual dan penguatan peran manusia dalam kehidupan sosial.

Dalam filsafat pendidikan Barat, terutama dalam aliran idealisme dan eksistensialisme, pendidikan tinggi dipahami sebagai proses pengembangan akal budi, kesadaran diri, dan tanggung jawab personal. Pandangan ini sejalan dengan filsafat pendidikan Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk berakal (*al-insān al-‘āqil*) yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Literatur menunjukkan bahwa konsep pengembangan potensi intelektual dan kesadaran etis menjadi irisan penting antara kedua perspektif tersebut.

Titik temu lainnya terletak pada pengakuan terhadap pentingnya kebebasan akademik dan pencarian kebenaran ilmiah. Filsafat pendidikan Barat memandang kebebasan berpikir sebagai prasyarat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sementara filsafat pendidikan Islam mengakui pentingnya ijtihad dan pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah intelektual. Dalam konteks pendidikan tinggi Islam, prinsip ini tercermin dalam pengembangan riset, diskursus ilmiah, dan dialog keilmuan lintas disiplin.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya perbedaan filosofis yang mendasar antara filsafat pendidikan Barat dan Islam. Perbedaan tersebut terutama terletak pada orientasi tujuan akhir pendidikan. Filsafat pendidikan Barat, khususnya dalam tradisi pragmatisme dan liberalisme, cenderung menempatkan

pendidikan tinggi sebagai sarana pencapaian keberhasilan individual dan kemanfaatan sosial dalam kerangka duniawi. Sebaliknya, filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan sebagai proses yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan tauhid sebagai landasan utama.

Perbedaan lain ditemukan pada pandangan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan Barat umumnya memosisikan ilmu sebagai entitas otonom yang dapat dipisahkan dari nilai-nilai transendental, sementara filsafat pendidikan Islam menempatkan ilmu dalam kerangka nilai ilahiah dan etika. Dalam konteks PTKIN dan PTKIS, perbedaan ini memengaruhi cara pandang terhadap integrasi ilmu agama dan ilmu umum serta orientasi pemanfaatan ilmu pengetahuan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa titik temu dan perbedaan filosofis tersebut termanifestasi secara berbeda dalam praktik pendidikan tinggi Islam negeri dan swasta. PTKIN cenderung lebih kuat dalam mengadopsi prinsip-prinsip filsafat pendidikan Barat, terutama dalam aspek sistem akademik, standarisasi mutu, dan orientasi profesionalisme. PTKIS, di sisi lain, cenderung lebih menonjolkan nilai-nilai filsafat pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter keislaman dan internalisasi nilai moral-spiritual, meskipun dengan variasi yang cukup beragam.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam dalam konteks pendidikan tinggi Islam bersifat dialogis, bukan antagonistik. Relasi dialogis ini membuka ruang bagi pengembangan paradigma pendidikan tinggi Islam yang adaptif dan kontekstual tanpa kehilangan fondasi nilai normatifnya. Pengakuan terhadap potensi rasional manusia, kebebasan berpikir, serta fungsi pendidikan

sebagai sarana transformasi sosial merupakan titik temu filosofis yang dapat memperkuat relevansi pendidikan tinggi Islam di tengah dinamika global.

Dalam tradisi filsafat pendidikan Barat, pendidikan tinggi dipahami sebagai wahana pembebasan intelektual dan pengembangan rasionalitas kritis. John Dewey (1986) misalnya, menempatkan pendidikan sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang memungkinkan manusia beradaptasi dengan perubahan zaman. Paradigma ini memberi kontribusi signifikan terhadap pengembangan metode ilmiah, kebebasan akademik, dan profesionalisme dalam pendidikan tinggi modern. Namun, sebagaimana dikritik oleh para pemikir pendidikan Islam, paradigma tersebut cenderung berorientasi pada tujuan imanen dan pragmatis, sehingga berpotensi meminggirkan dimensi etik dan spiritual pendidikan.

Sebaliknya, filsafat pendidikan Islam memandang pendidikan tinggi tidak hanya sebagai sarana pengembangan kompetensi akademik dan mobilitas sosial, tetapi sebagai proses pembentukan manusia yang sadar akan relasinya dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Orientasi transendental ini menjadikan pendidikan Islam memiliki misi moral dan spiritual yang membedakannya secara mendasar dari filsafat pendidikan Barat. Al-Faruqi menegaskan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat bebas nilai, melainkan selalu terikat pada worldview tertentu; karena itu, pendidikan Islam harus menjadikan nilai tauhid sebagai kerangka normatif dalam seluruh aktivitas keilmuan (Faruqi, 1989).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan teori pendidikan modern merupakan keniscayaan dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan

Islam yang hanya mengadopsi pendekatan rasional dan profesional tanpa basis nilai transendental berisiko mengalami reduksi makna, dari proses pembentukan insan berkarakter menjadi sekadar institusi pelatihan tenaga kerja (Hadi et al., 2024).

Dalam konteks PTKIN, titik temu dengan filsafat pendidikan Barat sering kali tampak dominan karena tuntutan regulasi nasional, akreditasi, dan standar mutu akademik. Kondisi ini memberikan keuntungan dalam penguatan sistem akademik dan pengakuan nasional maupun internasional. Namun demikian, dominasi pendekatan akademik modern juga menghadirkan tantangan serius dalam menjaga konsistensi nilai-nilai keislaman. Penelitian Armizi (2025) menunjukkan bahwa PTKIN menghadapi risiko sekularisasi pendidikan apabila integrasi nilai Islam hanya bersifat simbolik dan tidak terinternalisasi dalam kurikulum, riset, dan budaya akademik. Oleh karena itu, PTKIN dituntut untuk mengembangkan strategi integrasi nilai yang bersifat substantif. Integrasi tersebut tidak cukup diwujudkan melalui mata kuliah keislaman semata, tetapi harus tercermin dalam paradigma riset, orientasi pengabdian masyarakat, dan etos akademik yang berlandaskan nilai etik dan spiritual Islam.

Sementara itu, PTKIS memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengartikulasikan filsafat pendidikan Islam secara eksplisit. Fleksibilitas ini memungkinkan PTKIS mempertahankan identitas keislaman yang kuat dalam visi, kurikulum, dan budaya institusinya. Namun, tanpa dialog yang konstruktif dengan paradigma pendidikan modern, PTKIS berisiko terjebak pada eksklusivisme dan ketertinggalan dalam pengembangan keilmuan. Penelitian Nur Afif dkk. (2024) menegaskan bahwa integrasi nilai Islam

perlu dibarengi dengan penguatan kualitas akademik dan metodologi ilmiah agar pendidikan tinggi Islam tetap relevan dan kompetitif.

Lebih lanjut, kajian Rahmi dkk. (2025) menegaskan bahwa integrasi epistemologi Barat dan Islam harus dipahami sebagai proses selektif dan kritis. Nilai-nilai Islam ditempatkan sebagai kerangka normatif dan orientasi tujuan pendidikan, sementara rasionalitas dan metodologi ilmiah Barat berfungsi sebagai instrumen pengembangan ilmu. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan tinggi Islam mengembangkan paradigma pendidikan moderat yang rasional, humanis, dan berorientasi nilai.

Dengan demikian, perbedaan filosofis antara filsafat pendidikan Barat dan Islam tidak dapat dipahami sebagai penghalang, melainkan sebagai peluang epistemologis untuk membangun paradigma pendidikan tinggi Islam yang integratif. Titik temu filosofis dapat dimanfaatkan sebagai basis penguatan kualitas akademik dan daya saing global, sementara perbedaan orientasi nilai berfungsi sebagai penanda identitas dan arah normatif pendidikan tinggi Islam.

Implikasi Filosofis bagi Pengembangan Paradigma Pendidikan Tinggi Islam Negeri dan Swasta

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa dialog antara filsafat pendidikan Barat dan Islam melahirkan sejumlah implikasi filosofis penting bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam, baik di lingkungan PTKIN maupun PTKIS. Implikasi tersebut terutama berkaitan dengan arah paradigma pendidikan, orientasi tujuan institusional, konstruksi kurikulum, serta peran pendidikan tinggi Islam dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Implikasi pertama berkaitan dengan perlunya penguatan paradigma pendidikan tinggi Islam yang integratif. Literatur menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Islam idealnya tidak dibangun di atas dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, tetapi pada paradigma kesatuan ilmu (*unity of knowledge*). Filsafat pendidikan Islam menegaskan bahwa seluruh ilmu bersumber dari Tuhan dan memiliki tujuan etis, sementara filsafat pendidikan Barat memberikan kontribusi metodologis dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara sistematis dan kritis. Integrasi kedua perspektif ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan paradigma pendidikan tinggi Islam yang holistik.

Implikasi kedua menyangkut orientasi tujuan pendidikan tinggi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tinggi Islam tidak cukup dipahami sebagai pencapaian kompetensi akademik dan profesional semata. Pendidikan tinggi Islam perlu diarahkan pada pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan tanggung jawab sosial. Orientasi ini menempatkan pendidikan tinggi Islam sebagai institusi pembentuk karakter dan etika, bukan sekadar lembaga transmisi pengetahuan.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi Islam. Literatur menunjukkan bahwa kurikulum PTKIN dan PTKIS perlu disusun berdasarkan landasan filosofis yang jelas, sehingga integrasi nilai-nilai Islam tidak berhenti pada tataran simbolik. Kurikulum yang berlandaskan paradigma filosofis integratif memungkinkan ilmu-ilmu modern dikembangkan dalam kerangka nilai tauhid, sekaligus mendorong peserta didik untuk

memahami dimensi etis dan sosial dari ilmu yang dipelajarinya.

Hasil kajian juga menunjukkan implikasi filosofis terhadap peran pendidik dan peserta didik dalam pendidikan tinggi Islam. Pendidik tidak hanya berperan sebagai pengajar atau fasilitator akademik, tetapi juga sebagai teladan moral dan pembimbing intelektual-spiritual. Peserta didik dipandang bukan sekadar objek pembelajaran, melainkan subjek aktif yang memiliki potensi rasional dan spiritual yang perlu dikembangkan secara seimbang. Pandangan ini memperkuat dimensi humanistik dalam pendidikan tinggi Islam.

Implikasi lainnya berkaitan dengan peran strategis PTKIN dan PTKIS dalam menjawab tantangan globalisasi dan modernitas. Pendidikan tinggi Islam dituntut untuk tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat global, namun tetap berakar pada nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, PTKIN dan PTKIS memiliki tanggung jawab filosofis untuk menjadi pusat pengembangan ilmu yang tidak terlepas dari nilai etika dan kemanusiaan.

Implikasi filosofis yang diidentifikasi dalam temuan penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pendidikan tinggi Islam tidak dapat dilepaskan dari kejelasan paradigma filosofis yang melandasinya. Pendidikan tinggi Islam yang kehilangan orientasi filosofis berpotensi terjebak dalam pragmatisme pendidikan, di mana keberhasilan institusi direduksi pada indikator teknokratis seperti akreditasi, daya serap lulusan, dan efisiensi kelembagaan. Kritik terhadap pragmatisme pendidikan ini telah lama disampaikan oleh para pemikir pendidikan Islam yang menegaskan bahwa pendidikan tanpa orientasi nilai akan kehilangan makna transendental dan fungsi

pembentukan manusia seutuhnya (Hasan, 1995).

Paradigma integratif yang berakar pada dialog filsafat pendidikan Barat dan Islam menjadi alternatif strategis untuk menghindari reduksi makna pendidikan tersebut. Dalam kerangka ini, pendidikan tinggi Islam memanfaatkan rasionalitas ilmiah, kebebasan akademik, dan metodologi keilmuan modern yang berkembang dalam filsafat pendidikan Barat, tanpa mengabaikan dimensi etika dan transendental yang menjadi inti filsafat pendidikan Islam. Al-Faruqi (1989) menegaskan bahwa integrasi tersebut bukanlah bentuk adopsi pasif terhadap paradigma Barat, melainkan proses seleksi kritis yang menempatkan tauhid sebagai kerangka normatif utama bagi pengembangan ilmu dan pendidikan.

Implikasi filosofis ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam kontemporer memerlukan paradigma integratif agar tidak terjebak pada dikotomi antara ilmu dan nilai. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rasionalitas dan metodologi ilmiah modern dapat berfungsi sebagai instrumen pengembangan ilmu, sementara nilai-nilai Islam berperan sebagai penuntun arah dan tujuan pendidikan (Hadi et al., 2024).

Dalam pengembangan tujuan pendidikan, implikasi filosofis ini menuntut PTKIN dan PTKIS untuk mereorientasikan visi dan misinya. Pendidikan tinggi Islam idealnya tidak semata-mata diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga pada pembentukan insan yang memiliki kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap problem kemanusiaan. Orientasi ini relevan dengan tantangan global kontemporer, seperti krisis moral, ketimpangan sosial, dan degradasi nilai kemanusiaan. Penelitian Nur Afif dkk.

(2024) menegaskan bahwa pendidikan tinggi Islam memiliki potensi besar untuk menawarkan paradigma pendidikan alternatif yang humanis dan berorientasi nilai, asalkan integrasi nilai Islam dilakukan secara sistemik dan bukan simbolik.

Implikasi filosofis juga tercermin dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi Islam. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum tidak cukup dilakukan melalui penambahan mata kuliah keislaman, tetapi harus diwujudkan melalui pendekatan interdisipliner yang menempatkan etika dan spiritualitas sebagai bagian inheren dari setiap disiplin ilmu. Hal ini sejalan dengan penelitian Armizi dkk. (2025) yang menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi Islam harus dirancang sebagai sarana internalisasi nilai, bukan sekadar instrumen akademik yang berorientasi pada capaian kognitif semata.

Dari sisi peran pendidik dan peserta didik, implikasi filosofis ini menuntut perubahan paradigma relasi pedagogis. Pendidik di pendidikan tinggi Islam tidak hanya berfungsi sebagai transmittor pengetahuan, tetapi sebagai agen integrasi nilai dan keilmuan. Pendidik dituntut memiliki kesadaran filosofis dan etis agar mampu mengaitkan keilmuan dengan tujuan moral-spiritual pendidikan. Peserta didik, pada saat yang sama, diarahkan menjadi subjek pembelajar yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memperkuat dimensi humanistik dan dialogis dalam pendidikan tinggi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam kajian Rahmi dkk. (2025) tentang integrasi epistemologi Barat dan Islam dalam pendidikan Islam moderat.

Dalam konteks kelembagaan, implikasi filosofis ini memiliki makna strategis bagi PTKIN dan PTKIS. PTKIN, dengan struktur kelembagaan yang mapan

dan dukungan negara, memiliki peluang besar untuk mengembangkan paradigma pendidikan tinggi Islam yang terstandar dan diakui secara nasional maupun internasional. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa proses standardisasi tersebut tidak menghilangkan substansi nilai keislaman. Sebaliknya, PTKIS memiliki fleksibilitas ideologis yang lebih besar dalam mengartikulasikan nilai Islam, tetapi perlu memperkuat basis akademik dan manajerial agar nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan secara berkelanjutan dan relevan dengan tuntutan zaman.

E. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakikat Pendidikan Tinggi Islam, baik yang berstatus negeri maupun swasta, tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan struktural dan administratif, melainkan perlu ditelaah secara filosofis melalui dialog antara filsafat pendidikan Barat dan filsafat pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Islam berada dalam posisi dialektis antara rasionalitas modern dan nilai-nilai transendental. Filsafat pendidikan Barat berkontribusi dalam penguatan rasionalitas ilmiah, kebebasan akademik, dan profesionalisme, sementara filsafat pendidikan Islam berperan sebagai kerangka normatif yang menegaskan orientasi tauhid, integrasi ilmu dan amal, serta tujuan pembentukan insan kamil. Perbedaan antara PTKIN dan PTKIS lebih bersifat implementatif dan kontekstual, terutama pada aspek pengelolaan dan praksis pendidikan, bukan pada tujuan filosofis dasarnya, karena keduanya sama-sama diarahkan pada pembentukan manusia Muslim yang berilmu, berakhlak, dan

bertanggung jawab secara sosial serta spiritual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga analisis dibatasi pada konstruksi konseptual dan argumentasi teoretis tanpa dukungan data empiris dari praktik pendidikan di PTKIN dan PTKIS. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengombinasikan kajian filosofis dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus, penelitian lapangan, atau penelitian komparatif antar-institusi, guna memperoleh gambaran yang lebih kontekstual mengenai implementasi paradigma filosofis pendidikan tinggi Islam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis kurikulum, budaya akademik, dan kebijakan institusional PTKIN dan PTKIS dalam perspektif integrasi epistemologi Barat dan Islam, sehingga dapat memperkaya pengembangan paradigma pendidikan tinggi Islam yang integratif, humanis, dan berorientasi nilai.

F. CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini. Seluruh proses penulisan dilakukan secara independen dan bertanggung jawab. Penulis juga menegaskan bahwa artikel ini bebas dari unsur plagiarisme dan disusun dengan menjunjung tinggi etika akademik serta kaidah ilmiah yang berlaku.

G. DAFTAR PUSTAKA

Afif, N., Aziz, A., Mukhtarom, A., Mubin, F., & Lubis, M. R. (2024). Integrating Islamic Values in Online Learning: A Comparative Study of Western and Islamic Education Philosophies.

TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society, 11(1), 27–36.

Afzali, A. (2023). Quantitative meta-analysis of research on Islamic education courses of Universities and higher education institutions of the country. *Journal of Applied Issues in Islamic Education*, 8(2), 123–142.

Ahmadi, A., Syukur, F., Shodiq, S., & Rahman, T. (2022). Construction of an Islamic studies curriculum based on religious moderation in higher education institutions. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 17(2), 339–352.

al-Attas, S. (1993). Islam and secularism (Kuala Lumpur, International Institute of Islamic Thought and Civilization). *International Islamic University Malaysia*.

Aliyah, H., Anif, M., Warisno, A., Andari, A. A., & Anshori, M. A. (2023). Implementation of Islamic higher education development management in Indonesia. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 8(1), 175–186.

Altbach, P. G. (2011). The past, present, and future of the research university. *Economic and Political Weekly*, 65–73.

Armizi, A., Liriwati, F. Y., & Asfami, A. (2025). Critique of Western Educational Philosophy, the Urgency of Islamization, and Its Implementation. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 6(4), 1089–1103.

Aziz, Z. A. (2024). Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 2(2), 85–96.

- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Prenada Media.
- Dewey, J. (1930). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education* (Vol. 8). Macmillan New York.
- Dewey, J. (1986). Experience and education. *The Educational Forum*, 50(3), 241–252. Taylor & Francis.
- Faruqi, A. (1989). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Giroux, H. A. (2014). *Neoliberalism's war on higher education*. Haymarket books.
- Hadi, A., Anim, S., & Yasin, H. (2024). Integration of islamic principles and modern educational theories in islamic education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(2), 1385–1398.
- Hasan, L. (1995). Manusia dan pendidikan suatu analisa psikologi dan pendidikan. *Cet III. Jakarta. Al-Husna Zikra*.
- Husain, S., & Wahyuni, A. E. D. (2023). Kebijakan Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Islam: Tranformasi STAIN dan IAIN Menjadi UIN. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 4(1), 15–30.
- Khan, M. A., Jan, S. A., & Chughtai, F. (2023). *A Comparative Study of the Relevancy of Western Educational Philosophies and Islamic Philosophies*.
- Nasr, S. (1989). *Knowledge and the Sacred* Albany: State University of New Yor Press. 1989.
- Rahman, F. (2024). *Islam & modernity: Transformation of an intellectual tradition* (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Rahmi, A. A., Pradipta, A. A., Rizqoh, S., & Hufron, M. (2025). Integration of Western and Islamic Epistemology in Islamic Education for the Formation of Moderate Character in Students: Integrasi Epistemologi Barat dan Islam dalam Pendidikan Islam untuk Pembentukan Karakter Moderat Peserta Didik. *Averroes: Journal for Science and Religious Studies*, 2(01), 47–59.
- Singh, P. (2024). Western Education Thinkers: Tracing the Roots of Educational Philosophy. *Meadow International Journal of Advancements in Multidisciplinary Research*, 7(1 (November)), 39–44.
- Ubaidila, S., & Mustamir, A. K. (2023). Reviewing The Integration of Islamic Studies and Science in Islamic Religious Universities in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(1), 1–11.
- Yudiawan, A., & Himmah, A. (2023). Quality Management Transformation Of Islamic Religious Higher Education: A Literature Review. *Journal Of Quality Assurance In Islamic Education (JQAIE)*, 3(2), 118–133.
- Zakki, M., & Syafi'i, A. (2023). Strategi Perguruan Tinggi Islam Menuju World Class University. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(3), 39–47.